MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

MEI 2023

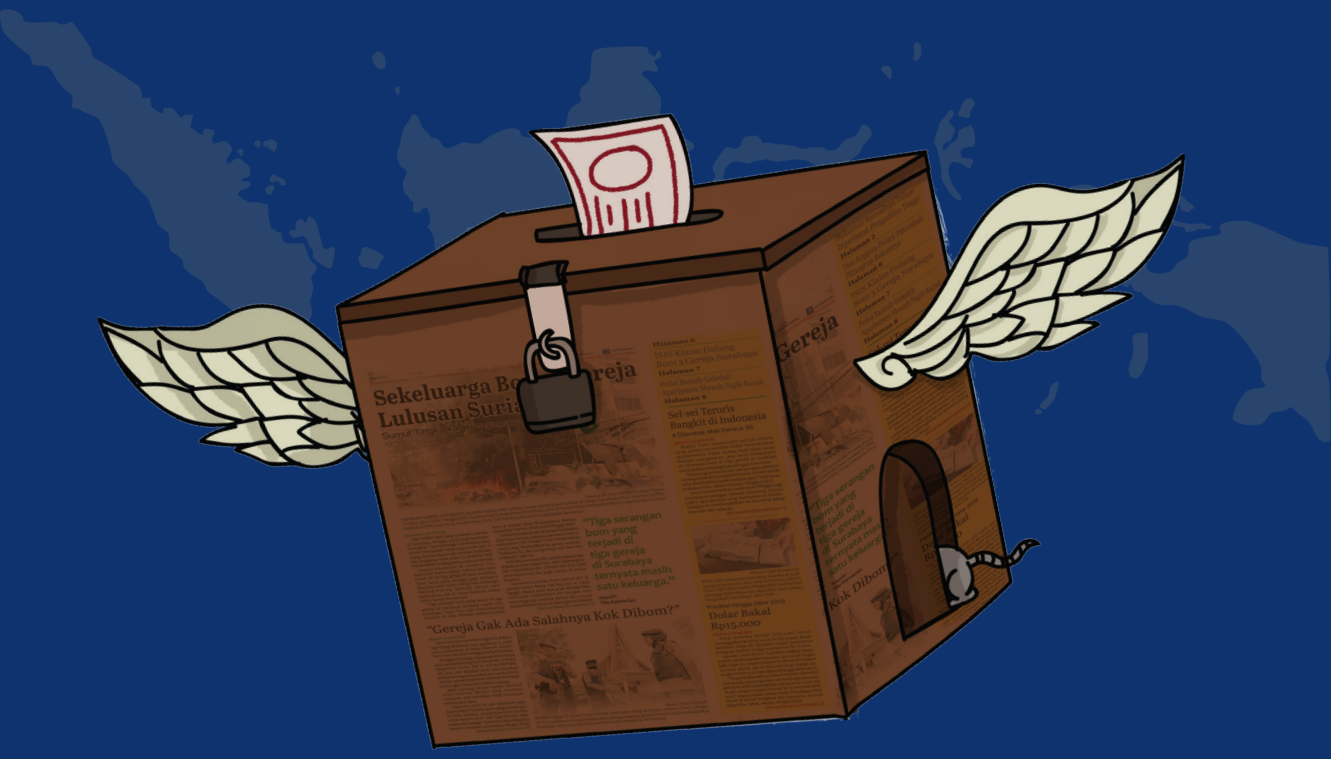

AGAMA YANG TERJEPIT

Sekira tiga dasawarsa lalu, seiring dengan banyaknya persoalan di Indonesia yang selalu dihubungkan dengan agama, Romo Sindhunata, dalam *Majalah Basis*, menyatakan bahwa Indonesia ini *too much religion*. Agaknya, pernyataan Romo Sindhu ini masih relevan dengan konteks kehidupan beragama di Indonesia kini. Meskipun bukan lagi mengenai semua hal yang selalu diarahkan pada agama, melainkan sekarang kehidupan beragama di Indonesia makin menyesakkan. Satu sisi, beberapa kebijakan yang sulit dimengerti mengapa muncul kebijakan tersebut. Namun, pada sisi yang lain, makin banyak orang atau masyarakat semena-mena memberi penilain terhadap perilaku keagamaan seseorang atau kelompok. Tambahan lagi, penganut agama juga tidak sedikit yang justru melakukan penyimpangan terhadap ajaran agamanya. Misalnya, makin banyak rekaman media tentang pelecehan seksual di lembaga agama. Belum lagi tentang belum surutnya radikalisme, ekstermisme, dan terorisme. Makin banyak contoh, sehingga makin rumit mencatatnya. Rupanya, makin ke kini, pernyataan Romo Sindhu makin menemukan konteksnya, bahkan dalam wujud yang lebih mengkhawatirkan.

Faktor apa sebenarnya sehingga demikian parahnya kehidupan beragama di Indonesia? Apakah ini dampak dari dibukanya kebebasan, khususnya kebebasan beragama, yang tidak diimbangi dengan seperangkat aturan yang memadai dan ditambah belum dewasanya warga negara dalam mengekspesikan keberagamaannya? Tentu saja tidak bermaksud menyalahkan atau bahkan menyudutkan pihak-pihak tertentu, tetapi banyaknya persoalan keagamaan yang mengesankan mencari celah aturan/kebijakan dan bahkan nilai agama untuk dilanggar merupakan area krusial yang ditilik bersama dan menjadi bahan refleksi mencari basis perbaikan di masa depan.

MURI edisi ini merupakan ikhtiar dalam memberi bahan refleksi tersebut berupa rekaman berita dalam satu-dua bulan terakhir. Rekaman berita ini, rupanya, masih didominasi oleh peristiwa kehidupan beragama yang cenderung mundur, kalau bukan malah berbalik arah, dari tujuan hidup berbangsa dan beragama. Selain sebagai bahan refleksi, berita-berita yang dirangkum dalam MURI ini juga untuk melihat dalam rentang waktu tertentu mengenai dinamika kehidupan beragama di Indonesia secara longitudinal. Hal ini tentu juga untuk melihat seberapa dinamis dan progresifnya kehidupan beragama di Indonesia. Selama membaca!

BA

DAFTAR ISI

- Agama yang Terjepit — 2
- Aksi Terorisme Lampung — 4
- Manipulasi Sumbangan dalam Momentum Keagamaan — 7
- Pasang Surut Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan — 11
- Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren — 16

AKSI TERORISME LAMPUNG

PERISTIWA penangkapan terduga teroris di Lampung oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror pada 12 dan 13 April 2023, mengungkapkan beberapa fakta penting. Empat tersangka yang berhasil ditangkap dan dua tersangka yang tewas merupakan anggota jaringan besar JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JI (Jamaah Islamiah) yang memiliki peranan penting dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari rekam jejak mereka dalam aksi Bom Bali I, peledakan gereja, dan konflik Poso di Sulawesi Tengah. Selama proses penangkapan, tim Densus 88 harus menghadapi perlawanan dari para terduga teroris, sehingga terjadi baku tembak yang mengakibatkan dua korban tewas dari pihak teroris dan satu korban luka dari pihak Densus 88. Peristiwa penangkapan di Lampung ini bukan kali pertama karena sebelumnya sudah terjadi, setidaknya, tujuh penangkapan terduga teroris sejak tahun 2019 di wilayah tersebut. Peristiwa Lampung menunjukkan bahwa aktivitas jejaring teroris di Indonesia masih cukup aktif dan memerlukan perhatian khusus dari aparat keamanan.

Teroris Lampung: Berencana Lakukan Aksi Teror

Densus 88 bergerak secara sigap dengan menangkap tersangka terorisme yang disinyalir berada di Lampung. Penangkapan yang dilakukan hari Rabu 12 April 2023 menjadi sebuah keberhasilan tersendiri bagi Densus 88 karena tersangka yang ditangkap merupakan teroris dengan *track record* yang cukup panjang. Hal ini dapat dilihat melalui riwayat sebelumnya, di mana mereka terlibat dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia. Selain terlibat dalam kasus-kasus lama, para tersangka teroris juga merencanakan melakukan aksi kembali, sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar, yang menyatakan bahwa mereka hendak melakukan aksi dengan cara meneror atau *amaliyah* dengan senjata api.

Berita Selengkapnya

Penangkapan Teroris di Lampung

Aksi penangkapan terhadap terduga teroris dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Kabupaten Prisengsewu dan Mesuji, Lampung, pada 12 dan 13 April 2023. Enam terduga teroris yang ditangkap disinyalir memiliki koneksi dengan anggota Jamaah Islamiyah (JI), Zulkarnain, yang pernah berkontribusi dalam aksi bom Bali I. Dalam proses penangkapannya, Densus 88 memperoleh perlawanan dari para terduga, sehingga baku tembak tidak dapat dihindarkan. Menurut penjelasan Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabag Banops) Densus 88, Kombes Aswin Siregar, empat orang berhasil ditangkap, sementara dua lainnya tewas di tempat. Selain itu, baku tembak tersebut juga menimbulkan satu korban luka dari pihak Densus 88.

Berita Selengkapnya

Fakta-Fakta Penangkapan 6 Teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Lampung

Operasi penangkapan selama dua hari yang dilakukan Densus 88 Antiteror terhadap enam teroris Jamaah Islamiyah (JI) memunculkan temuan lain. Dalam penangkapan tersebut, tim Densus menarget dua tempat, yakni di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pringsewu. Operasi yang dilakukan di dua tempat tersebut merupakan kelanjutan dari pengembangan kasus terhadap tersangka JA di Kabupaten Mesuji, sebagaimana yang dijelaskan juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar. Fakta-fakta dalam penangkapan ini meliputi beberapa hal, yakni terjadinya baku tembak antara Densus 88 dan para tersangka teroris, tewasnya dua orang tersangka teroris, adanya satu korban luka dari pihak Densus 88, salah satu tersangka berinisial N telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2016 dan pernah menyembunyikan DPO Bom Bali I, serta adanya rencana penyerangan terhadap polisi oleh para teroris.

Berita Selengkapnya

Identitas dan Peran Tersangka Terorisme

Juru bicara Densus 88 Antireror Polri, Kombes Aswin Siregar, pada saat jumpa pers menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas dan peran pada masing-masing tersangka terorisme yang ditangkap di Lampung. Dalam pemaparannya, Aswin menyatakan bahwa tim Densus 88 telah menangkap empat orang dengan inisial PS alias JA, H alis NB, AM, dan KI alias AS. Aswin menambahkan bahwa salah-satu teroris tersebut merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2016 karena berperan dalam pembuatan bunker perakitan senjata. Selain itu, tersangka lainnya diketahui memiliki dan menyimpan

senjata api. Temuan lain yang cukup mengejutkan adalah bahwa tersangka N alias NG merupakan tokoh sentral yang memfasilitasi pelarian teroris jaringan JI di Lampung, termasuk teroris yang berperan dalam aksi Bom Bali I dan konflik Poso.

Berita Selengkapnya

Serangkaian Penangkapan Berkaitan dengan Teorisme di Lampung

Aksi baku tembak dan penangkapan terhadap terduga teroris di Lampung pada Rabu 12 April 2023 merupakan salah satu dari rangkaian penangkapan yang telah terjadi sebelumnya. Setidaknya, ditemukan ada tujuh penangkapan sebelumnya yang terindikasi dengan aksi terorisme. Kejadian tersebut dapat dilihat pada kurun waktu pada tahun 2019 hingga yang terbaru pada tahun 2023. Tujuh penangkapan tersebut memiliki benang merah dengan beberapa aksi terorisme di Indonesia, yang memakan banyak korban jiwa, seperti di Poso dan di daerah lainnya. Selain itu, tersangka yang ditangkap berasal dari latar belakang kelompok yang sama, yakni JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JI (Jamaah Islamiyah).

Berita Selengkapnya

MANIPULASI SUMBANGAN DALAM MOMENTUM KEAGAMAAN

MOMENTUM perayaan hari besar agama merupakan agenda yang kerap menjadi puncak ekspresi peribadatan umat beragama. Perayaan hari besar agama menjadi pengingat tentang sebuah peristiwa besar dalam masing-masing agama yang diperingati satu kali dalam setahun. Dalam upaya memperlancar rangkaian acara perayaan itu, masing-masing umat beragama berlomba untuk memberikan persembahan terbaik yang mereka mampu. Misalnya, pada Ramadan, umat Islam berlomba untuk saling beramal. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, umat dari agama lain juga turut andil dalam berbagi sedekah dengan memberikan takjil buka puasa.

Sayangnya, fenomena beragama seperti ini menjadi celah bagi beberapa oknum untuk masuk dan mengambil keuntungan personal. Fenomena jumlah pengemis yang membludak menjadi peristiwa tahunan yang mewarnai sepanjang Ramadan. Para pengemis musiman ini memanfaatkan kebaikan umat saat menjalankan ibadah puasa dengan dengan meminta-minta. Hal ini semacam menjadi pola dan berulang setiap tahun. Aksi manipulasi dana amal ini juga terjadi pada umat beragama lain. Pada pertengahan Januari 2023 silam, dengan memanfaatkan momentum menjelang perayaan Nyepi, para pelaku elaku memalak masyarakat dengan alasan bahwa uang sumbangan tersebut digunakan untuk pembuatan ***ogoh-ogoh.***

Aksi manipulasi dana umat ini juga terjadi dalam paruh pertama Ramadan di tahun 2023. Aksi ini menggunakan modus baru melalui pemalsuan kode QRIS kotak amal unuk keuntungan personal yang dilakukan oleh oknum di beberapa masjid di Jakarta. Masih di seputar Ramadan ada jua berita BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PO Bus Budiman dan berita Pemuda Pancasila yang juga melakukan hal serupa ke masyarakat sekitar jelang hari raya.

Satpol PP Medan Menertibkan Pengemis Musiman di Bulan Ramadan

Dinsos Kota Medan, Sumatra Utara, bersama Satpol PP setempat melakukan penertiban pengemis musiman di bulan Ramadan. Patroli secara acak dilakukan dalam menjaring pengemis musiman. Para pengemis musiman memanfaatkan momentum bulan Ramadan dengan meminta-minta di pasar modern. Banyak pengemis yang terjaring ternyata berasal dari luar kota. Penertiban terus dilakukan di titik-titik yang dijadikan tempat mangkal mereka. Setelah dilakukan penjaringan, para pengemis ini kemudian dibina dan beberapa dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Berita Selengkapnya

Satpol PP DKI Menjaring Pengemis Musiman

Satpol PP DKI kerap melakukan penjaringan pengemis di Jakarta. Pihaknya menjelaskan bahwa mereka tidak ingin Jakarta dipenuhi pengemis yang memanfaatkan momentum Ramadan dengan meminta-minta. Arifin selaku ketua Satpol PP DKI Jakarta menduga bahwa tidak semua pengemis adalah orang yang tidak mampu. Hal ini didasarkan pada temuan Satpol PP DKI bahwa pendapatan para pengemis justru melampaui pendapatan pekerja di Ibu Kota. Penjaringan dilakukan sebagai upaya menghilangkan mental pemalas dengan meminta-minta belas kasih. Dalam penjaringan yang dilakukan selama 9 Februari - 10 April 2023, Satpol PP memperoleh 2.086 data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Arifin menjelaskan bahwa setelah terjaring, para PPKS diserahkan ke Dinsos DKI Jakarta untuk diasesmen apakah mereka mempunyai keluarga atau tidak dan pencocokan data berdasarkan KTP.

Berita Selengkapnya

Pemalsuan Barcode QRIS Kotak Amal

Pemalsuan barcode QRIS kotak amal telah terjadi di sejumlah masjid di Jakarta. Prima DMI (Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia) mengecam pelaku yang memanfaatkan masjid untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Aksi ini terekam kamera CCTV kemudian menjadi perbincangan ramai di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, seorang pria menempelkan stiker QRIS di kotak amal masjid. Imbas dari aksi ini tentu dana infak dari para jamaah masjid tidak diterima oleh masjid, tetapi terkirim ke rekening pelaku. Pengurus Masjid Istiqlal menemukan setidaknya 50 stiker QRIS palsu yang telah ditempelkan di beberapa titik. Masjid lain yang juga menjadi sasaran adalah

Masjid Nurul Iman Blok M Square dan Masjid Nurullah Kalibata City Pancoran. Pelaku menuliskan “Restorasi Masjid” dalam keterangan barcode QRIS yang disebarkannya. Setelah mengetahui aksi ini, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nurul Iman Blok M Square telah melibatkan polisi.

Berita Selengkapnya

Pelaku Pemalsuan QRIS Ditangkap

Pelaku pemalsuan QRIS di beberapa masjid di Jakarta akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terjerat Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 a ayat 1 dan atau Pasal 35 ayat Jo 51 a ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 80 dan Pasal 73 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara di atas lima tahun. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku telah menempelkan stiker barcode QRIS pada 38 lokasi di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Masjid Istiqlal, Masjid Agung Sunda Kelapa, dan Masjid Cut Meutia. Dari aksinya menempelkan QRIS palsu, pelaku mendapatkan dana sekitar 13 juta dalam satu pekan.

Berita Selengkapnya

BNN Meminta THR ke PO Bus Budiman

Media sosial dihebohkan dengan tersebarnya sebuah surat yang memuat ajakan partisipasi dan apresiasi untuk membantu THR dengan keterangan kop surat BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Surat itu lengkap dengan tanda tangan Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim. Surat tersebut ditujukan kepada salah satu operator bus di Tasikmalaya dan berisi permohonan bantuan partisipasi dan apresiasi untuk THR maupun paket lebaran. Surat tersebut juga menyertakan jumlah THR maupun paket lebaran ditujukan kepada 28 anggota BNN Kota Tasikmalaya. Humas PO Bus Budiman Ahmad Luzen menerangkan bahwa pihaknya belum menerima surat tersebut. Informasi berkaitan dengan hal ini ia ketahui setelah ramai di media sosial. Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim, menerangkan bahwa terdapat kesalahan pada berita yang viral tersebut, sehingga suratnya telah dicabut. Tujuan awal adanya surat tersebut adalah memberi tambahan bantuan untuk anggotanya.

Berita Selengkapnya

Pemuda Pancasila Meminta THR

Surat permohonan dana menjelang Idulfitri lagi-lagi ramai di media sosial. Surat dengan kop Pemuda Pancasila Pimpinan Ranting Cengkareng Timur, Jakarta Barat, tersebar di media sosial. Wakil ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta, Lasman Napitupulu, mengaku tidak mengetahui surat permohonan dana tersebut. Lasman menjelaskan bahwa selama Ramadan pihaknya memang memiliki program tetapi tidak melakukan permintaan sumbangan. Sekretaris Wilayah Majelis Pimpinan Wilayah PP DKI Jakarta, Empay Supiyantoro, mengaku bahwa pihaknya tidak mengeluarkan perintah kecuali pengamanan hari-hari agama. Kapolsek Cengkareng memberikan pernyataannya bahwa pihaknya akan mengonfirmasi terkait surat tersebut kepada Ketua Ranting Pemuda Pancasila Cengkareng Timur.

Berita Selengkapnya

PASANG SURUT KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

SEBAGAI negara multikultural, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama yang mana masyarakatnya hidup dalam keberagaman adalah keniscayaan. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) merupakan salah satu hak setiap warga negara dan dilindungi oleh negara. Setiap orang dilarang mengganggu atau memaksa orang lain untuk berekspresi sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dalam hal ini, Komnas HAM sejak tahun 2020 melalui Surat Keputusan Norma (SNP) menjadi payung institusi untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi masyarakat Indonesia.

Namun, dalam perjalanannya, penerapan KBB di Indonesia perlu dievaluasi. Setidaknya, dalam laporan berita ini memuat sembilan kasus hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di masyarakat pada bulan April 2023. Kasus KBB yang terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari konflik internal antara penganut satu agama, seperti pelarangan penggunaan lapangan untuk salat Idul Fitri di Pekalongan dan Sukabumi, hingga antar-umat beragama, seperti di Bandung di mana umat Kristen HKBP memperoleh protes dari masyarakat sekitar terkait penggunaan ruko untuk beribadah. Selain itu, terdapat juga satu berita yang menujukkan bahwa Indonesia masih terus berupaya menerapkan KBB di masyarakat melalui pembangunan Kristen Center di Papua yang memperoleh perhatian dari pemerintah. Walaupun demikian, penerapan KBB di Indonesia perlu terus dievaluasi, terlebih dari kesadaran masyarakatnya.

Penutupan Patung Bunda Maria

Berita menghebohkan terjadi pada awal bulan puasa Ramadan 2023, yaitu penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo, DI Yogyakarta. Kejadian ini sempat membuat salah paham, baik di media sosial maupun di masyarakat. Hal tersebut karena beredar informasi bahwa penutupan patung disebabkan oleh desakan Organisasi Masyarakat (Ormas). Namun, pihak pemilik Rumah

Do'a mengklarifikasi berita yang beredar, dan menjelaskan bahwa penutupan Patung Bunda Maria karena inisiatif dari pihaknya. Pejabat Sekda DIY, Wiyos Santoso, mengatakan bahwa berita tersebut hanya salah paham semata. Wiyos Santoso menambahkan bahwa masyarakat DIY wajib mengedepankan toleransi, sehingga kasus dugaan di atas tidak terjadi.

Berita Selengkapnya

Mahasiswa Universitas Teuku Umar Mengunggah Jumat Agung

Memberikan ucapan perayaan keagamaan kepada penganut agama lain sering dinilai sebagai aksi toleransi. Namun, mahasiswa di Universitas Teuku Umar Aceh, NAD, yang mengunggah ucapan Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023 di akun resmi Instagram @dpm.utu dinilai kurang etis oleh pihak kampus. Hal tersebut disandarkan pada demografi kampus yang mayoritas Muslim dan Aceh yang dikenal sebagai *Serambi Makkah*. Dampak dari unggahan tersebut, empat mahasiswa yang terlibat mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta diminta untuk bersyahadat kembali karena dinilai telah murtad secara tindakan. Menanggapi kasus tersebut, Muhammad Mirza Ardi, peneliti dan pengamat kebijakan publik, berkomentar bahwa memberikan ucapan peringatan hari raya agama lain bukanlah suatu permasalahan, yang terpenting tidak mengimaninya. Mirza juga menambahkan aksi empat mahasiswa tersebut seharusnya diapresiasi karena telah melakukan aksi toleransi kepada penganut agama lain.

Berita Selengkapnya

Pelarangan Salat Idul Fitri di Lapangan Pekalongan

Sudah hal lumrah bila terjadi perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia. Seyogyanya, masyarakat bijak menghadapi fenomena tersebut. Aksi pelarangan penggunaan Lapangan Mataram di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, untuk salat Idul Fitri merupakan bentuk diskriminasi. Mengingat tahun 2023 terjadi perbedaan penetapan hari lebaran di Indonesia yang mana kelompok yang memperoleh larangan salat Idul Fitri di Lapangan Mataram adalah kelompok yang merayakan Idul Fitri berbeda dengan penetapan pemerintah. Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, mengatakan umat Islam dapat melaksanakan salat Idul Fitri di mana pun kecuali di Lapangan Mataram. Merespons hal tersebut, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk bijak menghadapi perbedaan pilihan keagamaan di masyarakat. Selain

itu, Menag juga menyampaikan agar mengakomodasi setiap permohonan izin dalam menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berita Selengkapnya

Pelarangan Salat Idul Fitri di Lapangan Sukabumi

Tidak hanya di Pekalongan, kasus pelarangan penggunaan fasilitas umum untuk pelaksaanaan salat Idul Fitri 2023 sempat terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Lapangan Merdeka. Kendati akhirnya dibolehkan, pelarangan yang terjadi sempat menghebohkan masyarakat karena pelarangan tersebut berdampak pada warga Muhammadiyah yang hendak melaksanakan salat Idul Fitri tanggal 21 April 2023 yang mana berbeda dengan penetapan pemerintah yaitu tanggal 22 April 2023. Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi, merespons informasi yang beredar dengan menerbitkan surat yang berisi bahwa berita pelarangan yang beredar adalah tidak benar. Selain itu, pihak pemkot bersedia memfasilitasi masyarakat yang ingin salat Idul Fitri, meskipun berbeda dengan hari dengan penetapan pemerintah.

Berita Selengkapnya

Jalan Terjal Peresmian Gereja GKI Taman Yasmin

Perjuangan umat Kristen untuk membangun Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin berakhir dengan peresmian secara sah. Pendirian gereja ini memakan waktu 15 tahun untuk dapat diterima dan diresmikan. Gereja yang diresmikan pada tanggal 9 April 2023 ini mengalami jalan terjal seperti penarikan izin pendirian bangunan pada tahun 2011 dengan dalih terdapat administrasi kurang lengkap, serta diminta untuk direlokasi pada tahun 2012. Walikota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya, mengatakan terdapat 30 kali pertemuan resmi dan lebih dari 100 kali pertemuan informal diadakan untuk membahas jalan keluar. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) turut andil dalam memperjuangkan izin bangunan GKI Yasmin dengan melakukan verifikasi ulang persyaratan izin, serta memberikan surat rekomendasi kepada pihak GKI Yasmin. Pada akhirnya, GKI Yasmin memperoleh izin, meskipun harus direlokasi di Kelurahan Cilendek Barat dari izin awalnya di Kelurahan Curug Mekar, Kota Bogor.

Berita Selengkapnya

Izin Gereja Paroki Cikarang

Selain dialami oleh GKI Yasmin, izin pembangunan Gereja Ibu Teresa Paroki Cikarang, Jawa Barat, juga sempat mengalami hambatan. Proses pengurusan perizinan Gereja ini dimulai sejak tahun 2004, dan pada tahun 2012 sudah mengantongi surat rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, hingga tahun 2021 belum juga memperoleh izin. Pejabat Bupati Kota Bekasi, Dani Ramdan, menjelaskan akar permasalahan kenapa Gereja Ibu Teresa belum memperoleh izin. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena persoalan kawasan. Kawasan yang ditempati oleh gereja ini berlokasi di tanah komersial segmen Lippo Cikarang di mana syarat pembangunan rumah ibadah harus bertempat di tanah untuk fasilitas umum. Kemudian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN merevisi *master plan* Lippo Cikarang. Dan kini Gereja Ibu Teresa Paroki Cikarang sudah memperoleh izin dan diresmikan pada tanggal 11 April 2023. Proses perjuangan Gereja Ibu Teresa Paroki Cikarang ini memakan waktu 18 tahun.

Berita Selengkapnya

Izin Sementara Penggunaan Ruko Sebagai Tempat Ibadah

Berbeda dengan yang dialami pihak GKI Yasmin dan Gereja Ibu Teresa Paroki Cikarang, di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terdapat gereja yang bertempat di ruko. Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) sempat heboh karena memperoleh penolakan dari masyarakat sekitar terkait aktivitas peribadatan di lokasi ruko. Penolakan tersebut terjadi secara verbal maupun melalui spanduk. Mengetahui hal tersebut, jajaran Polresta Bandung berdialog dengan pihak terkait untuk mengetahui kejadian di lapangan. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, pada tanggal 12 April 2023 mengatakan pihaknya akan memberikan izin kepada pihak Gereja HKBP untuk melakukan peribadatan di ruko tersebut, tetapi sifatnya sementara dan hanya berlaku dua hingga tiga tahun. Kusworo Wibowo juga menjelaskan bahwa penolakan dari masyarakat bukan disebabkan oleh sentimen agama, tetapi karena ruko tersebut tidak diperuntukkan untuk ibadah.

Berita Selengkapnya

Pembangunan Gedung Kristen Center di Papua

Aspirasi umat Kristen, melalui tokoh-tokoh gereja, untuk mendirikan *Kristen Center* di Papua memperoleh perhatian pemerintah. Pada tanggal 17 April 2023, terjadi rapat yang diikuti oleh Wakil Presiden Indonesia bersama Menteri

PUPR, Menteri Agama, dan Mendikbud Ristek, di kediaman Wapres di Jakarta untuk membahas rencana pembangunan *Kristen Center* di Papua. Apabila program ini terealisasikan, bangunan ini akan dijadikan untuk *Pusat Studi Kristen*, kata Masduki, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi. Masduki juga menjelaskan sudah mempunyai dua opsi lokasi yang akan dilakukan studi lanjut untuk pendirian bangunan *Kristen Center*.

Berita Selengkapnya

Dua Wanita Muda di Sumbar Ditelanjangi dan Diceburkan ke Laut

Dua wanita pemandu lagu di salah satu cafe di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi sasaran amuk sekelompok orang pada tanggal 8 April 2023. Dua wanita tesebut diperlakukan tidak manusiawi dengan ditelanjangi hingga diceburkan ke laut. Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Novianto Taryono, mengatakan bahwa kemarahan sekelompok orang yang juga melakukan pengerusakan cafe dan penganiayaan kepada dua orang wanita disebabkan karena cafe tersebut masih beroperasi di bulan Ramadan. Mengetahui kejadian ini, pihaknya tidak tinggal diam dan akan melakukan penelusuran kepada para pelaku untuk ditindak tegas, imbuhnya.

Berita Selengkapnya

Raperda tentang Tumbuh Kembang Kehidupan Beragama

Peraturan Daerah (Perda) Ramadan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Timur, sudah berlangsung sejak tahun 2003. Peraturan hasil perubahan dari Perda Nomor 13 tahun 2003 ke Perda Nomor 4 tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadan akan dicabut atau tidak diberlakukan sebelum bulan puasa 2023 datang. Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, mencabut perda tersebut untuk kemudian menggantinya dengan Raperda tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama. Ibnu Sina menjelaskan terkait pencabutan perda tersebut karena ada insiden keributan saat penertiban di salah satu rumah makan non-Muslim oleh Satpol PP. Selain itu, alasan lainnya terkait aturan jam operasional usaha kuliner saat Ramadan yang dinilai memberatkan warga yang tidak menjalankan ibadah puasa. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Jefri Fransyah, turut menambahkan bahwa isi Raperda hanya memuat aturan-aturan umum terkait upaya menumbuhkembangkan kehidupan beragama di Banjarmasin.

Berita Selengkapnya

PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN

PELECEHAN seksual yang dilakukan pengasuh pondok pesantren semakin meresahkan masyarakat, khususnya para orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di pondok pesantren. Menurut laporan yang dirangkum dari beberapa berita, kasus pelecehan seksual, para korban mengaku bahwa mereka diiming-imingi dengan janji-janji manis yang sering kali dibalut dengan ajaran-ajaran agama agar mereka mau memenuhi keinginan tersangka. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. Kasus tersebut sangat mengkhawatirkan terlebih dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren (ponpes) di banyak daerah. Baru-baru ini terjadi di Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Ponpes Sembungan, Ungaran, Jawa Tengah. Hal tersebut membuktikan bahwa tindakan pencabulan di lingkungan keagamaan masih marak terjadi bahkan di ranah pondok pesantren, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para santri.

Satu sisi, pelecehan seksual tentu tidak dapat dibiarkan, dan sisi lainnya, pelecehan justru dilakukan terhadap anak di bawah umur dan lebih memprihatinkan lagi perilaku tersebut dilakukan di lembaga agama. Meskipun demikian, peristiwa ini ternyata bukan hanya terjadi beberapa kali, melainkan sering kali di banyak tempat di Indonesia.

Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Batang, Jawa Tengah

Wildan Mashuri Amin (57), seorang pengasuh pondok pesantren di Desa Wonosegoro, Bandar, Batang, Jawa Tengah, melakukan pelecehan seksual terhadap 14 santriwati di bawah umur. Kasus ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk Polda Jawa Tengah yang mengungkap kasus ini bersama Polres Batang. Diduga jumlah korban akan bertambah mengingat pencabulan ini sudah berlangsung sejak tahun 2019. Tersangka menggunakan modus membujuk para korban untuk melakukan hubungan seksual dengan

melakukan upacara pernikahan tidak resmi yang dikenal dengan sebutan "ijab qabul". Upacara tersebut dilakukan hanya oleh tersangka dan korban, tanpa saksi, dan didahului dengan jabat tangan. Tersangka mengklaim bahwa korban akan menerima berkah dan keberuntungan untuk generasi mendatang.

Berita Selengkapnya

Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Sembungan, Ungaran Barat

Kasus pelecehan seksual di pondok pesantren kembali dialami seorang santri di salah satu pondok pesantren di Sembungan, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengasuh pondok pesantren berinisial ZM melakukan pelecehan terhadap santriwati yang masih di bawah umur. Menurut Surya Kusuma Wardana, pengacara korban, mengatakan kepada wartawan bahwa korban dianiaya di kediaman pelaku. Korban mengalami pelecehan seksual secara verbal dan fisik. Perbuatan pelaku mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan. Korban yang saat itu tinggal di asrama pondok pesantren melarikan diri dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya.

Berita Selengkapnya

Santriwati Korban Pelecehan Mengalami Trauma Berat

Kepolisian Resor Semarang, Jawa Tengah, yang menerima laporan dan membenarkan terjadi pelecehan seksual di sebuah pondok pesantren (ponpes) di daerah Ungaran. Laporan tersebut, menurut Kapolres Semarang AKBP Achmad Oka Mahendra, menyangkut tindakan asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Selain itu, AKBP Oka menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Polisi mengumpulkan bukti-bukti d iantaranya hasil visum korban dari rumah sakit, dan menunjukkan korban mengalami trauma berat. Menurut laporan, Surya Kusuma Wardana, selaku kuasa hukum korban, korban merupakan seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun dianiaya oleh seorang pengasuh pondoknya. Selain itu, korban juga diberikan uang tutup mulut sebesar Rp 250.000.

Berita Selengkapnya

Kementerian Agama: Pemberian Sanksi hingga Pencabutan Izin Pondok Pesantren

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama RI menegaskan tentang peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1626 tahun 2023 menetapkan bahwa lembaga

terkait akan disanksi jika mereka ditemukan gagal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti gagal mengembangkan akhlak dan karakter santri melalui perilaku yang patut dicontoh, gagal meningkatkan kecerdasan dan kompetensi mereka, gagal menunjukkan kasih sayang dan perlindungan kepada mereka, dan gagal menjunjung tinggi kewajiban hukum santri. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin operasional atau Surat Tanda Terdaftar Pondok Pesantren.

Berita Selengkapnya

KPPPA dan Kemenag Mendorong Lembaga Pendidikan Keagamaan Membentuk Satgas PPKS

Kemenag mendukung penegakan hukum yang menyasar pelaku kekerasan seksual. Kemenag berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan kepolisian untuk menangani kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk sementara. Isu pencegahan kekerasan seksual di tempat-tempat pendidikan keagamaan diatur antara lain dalam peraturan ini. Peraturan ini mendorong lembaga pendidikan keagamaan untuk membentuk satuan tugas (Satgas PPKS) untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Berita Selengkapnya

Ganjar: Meningkatnya Pelecehan Seksual terhadap Anak di Batang Perlu Diselidiki

Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sejak September 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kasus pelecehan seksual di salah satu Pondok Pesantren di Batang ibarat ledakan gunung es yang semakin membesar. Menurutnya, ke depan tim dari pemerintah akan menyelidiki tempat kejadian untuk menentukan apa yang terjadi, dan jika sekolah atau fasilitas pengajaran perlu ditutup, maka akan dilakukan penutupan. Beliau menekankan pentingnya kesadaran tentang isu-isu terkait untuk mencegah tindakan asusila terhadap rekan kerja, teman, dan orang asing baik dari lingkungan sekitar maupun keluarga karena mereka yang melakukan pelecehan terhadap orang lain sering kali berasal dari keluarga dan teman dekat.

Berita Selengkapnya

Pemerhati Anak: Pemerintah Perlu Memastikan Peraturan Telah Disosialisasikan

Sejumlah pihak mengecam rentetan peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Batang. Terlebih lagi, para pelaku merupakan tenaga pendidik yang memiliki tugas untuk menjaga anak didiknya. Retno Listyarti, pemerhati anak, berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan kasus ini, tetapi juga berupaya untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Retno menegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan membuat sistem pencegahan. Retno menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan peraturan-peraturan tersebut telah disosialisasikan ke lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, dan sekolah-sekolah. Selain itu, perlu juga dibentuk gugus tugas untuk memerangi kekerasan seksual. Retno menyarankan agar para orang tua sering berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Hal ini penting agar orang tua selalu mengetahui perkembangan anak-anaknya.

Berita Selengkapnya

Zainut Tauhid; Orang Tua Harus Memastikan Pesantren yang Akan Dipilih

Pelecehan seksual yang terjadi di pesantren, menurut Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, merupakan tindakan yang keji. Oleh karena itu, ia memberikan beberapa saran kepada para orang tua tentang apa yang harus mereka pertimbangkan sebelum memasukkan anak-anak mereka ke pesantren. Menurut Zainut, para orang tua harus terlebih dahulu memastikan bahwa pesantren tempat anak-anak mereka terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian, pesantren tersebut juga harus terkenal.

Berita Selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | JUNI 2023

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Elly Dyah Praptanti | **Redaktur Artistik:** m rizal abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Intan Novelia, , Selvone Christin Pattiserlihun, Nadila Ika Arifianti, Musdodi Manalu, Muhammad Syihabuddin Annur, Zulfikarni Bakri, M. Naufal Firosa Ahda